

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika konflik perebutan sengketa atas kepemilikan Laut Cina Selatan telah menjadi pusat perhatian negara-negara di Kawasan Asia, khususnya Cina dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Perebutan sengketa atas kepemilikan Laut Cina Selatan dilatarbelakangi oleh potensi yang dimiliki oleh Laut Cina Selatan meliputi sektor ekonomi, politik pertahanan dan keamanan, sumber daya alam dan lain sebagainya. Potensi tersebut seringkali dipermasalahkan oleh beberapa negara tentang kedaulatan negaranya di Laut Cina Selatan hingga menimbulkan konflik baku tembak di kawasan Laut Cina Selatan.¹

Secara geografis, Laut Cina Selatan terletak di sebelah barat Samudra Pasifik dan membentang sampai ke Asia Tenggara yang berbatasan dengan Selat Taiwan di sebelah utara dan Teluk Thailand di sebelah selatan. Laut Cina Selatan memiliki luas kurang lebih sekitar 3.500.000 km² dengan jajaran pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni seperti Kepulauan Spratly, Kepulauan Pratas, dan Kepulauan Paracel.² Laut Cina Selatan juga memiliki kekayaan sumber daya alam meliputi cadangan gas alam dan minyak bumi yang sangat melimpah dan cukup

¹ Nur Hidayati. 2021. *5 Fakta Laut Cina Selatan, Kenapa Dipenuhi Sengketa?* Diakses melalui <https://www.matamatapolitik.com/listicle/listicle-ini-bukan-latihan-5-fakta-tentang-laut-china-selatan> , pada 15 September 2021

² *Ibid*

untuk memenuhi kebutuhan minyak dunia dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kegiatan observasi lapangan dengan menggunakan media kabel dan pipa bawah laut untuk meneliti kandungan gas alam dan minyak bumi yang terkandung di kawasan Laut Cina Selatan.³

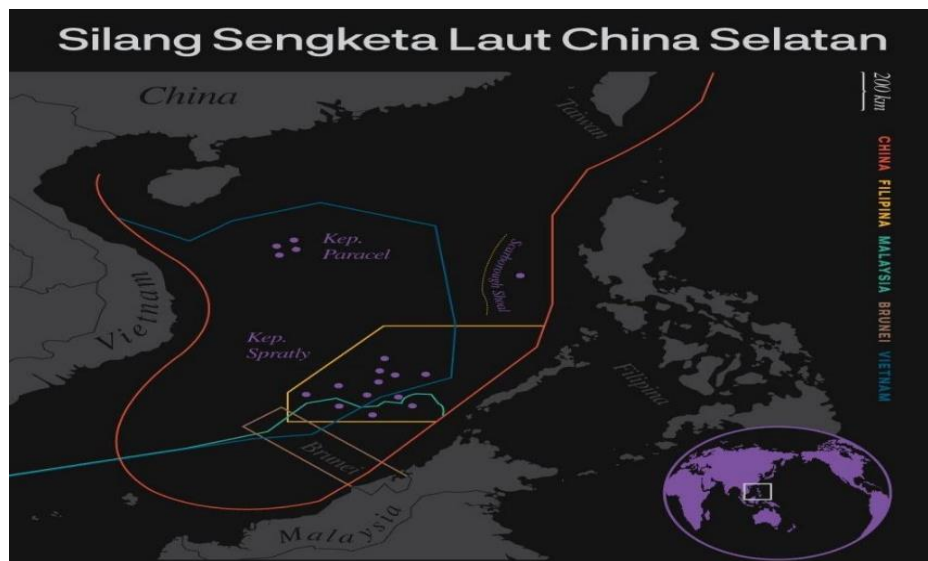
Laut Cina Selatan juga menjadi jalur pelayaran utama yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik yang secara tidak langsung juga menjadikannya sebagai arus perekonomian jalur laut utama yang berperan penting dalam kegiatan ekspor dan impor.⁴ Lebih dari setengah aktivitas kapal tanker minyak dunia menggunakan Laut Cina Selatan sebagai jalur utama kegiatan distribusi ekspor dan impor minyak mentah dari Australia dengan total perdagangan mencapai \$ 2,9 Trillion US Dollar.⁵ Melihat potensi yang dimiliki Laut Cina Selatan, tentu membuat banyak negara-negara saling memperebutkan sengketa hak kepemilikan kawasan perairan tersebut.

Gambar 1. 1 Peta Silang Sengketa Laut Cina Selatan

³ Ade Priangani dan Jeremy Aldi Risky Hattu. 2020. STRATEGI RRC DALAM DINAMIKA KONFLIK DI LAUT. *Jurnal Academia Praja*, Vol 3, Hal 113-114

⁴ *Ibid*

⁵ Nur Hidayati, *Loc Cit.*



Sumber : CNN Indonesia⁶

Perebutan sengketa Laut Cina Selatan selalu diwarnai oleh ketegangan politik internasional dan aksi baku tembak kapal perang dari negara-negara yang saling mempertahankan posisi kedaulatan mereka atas kawasan Laut Cina Selatan. Ketegangan politik tersebut dilatar belakangi oleh kepentingan nasional dari masing-masing negara yang terfokus pada potensi Laut Cina Selatan dalam berbagai aspek meliputi: peningkatan ekonomi, pengaruh politik, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Adapun wilayah-wilayah yang diklaim oleh negara-negara yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan guna

⁶ CNN Indonesia. 2021. *Silang Kepentingan China dan Negara Tetangga di LCS*. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210205151933-113-602785/silang-kepentingan-china-dan-negara-tetangga-di-lcs> , pada 3 November 2021

mempertahankan kedaulatannya di kawasan tersebut diantaranya ada Cina, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam.⁷

Cina mengklaim hampir keseluruhan luas Laut Cina Selatan yang meliputi Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, Kepulauan Spratly, Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Tepi Macclesfield, Scarborough Reef, dan kawasan lain disekitarnya. Melalui Departemen Kementrian Geografi Cina mengeluarkan peta yang mencantumkan klaim Cina atas Laut Cina Selatan dalam sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*) pada tahun 1947 dan diresmikan pada tahun 1953.⁸ Cina menggunakan tiga pendekatan yang mendasari alasan pengklaiman Laut Cina Selatan yaitu, pendekatan sejarah, pengakuan kedaulatan dari negara lain atau komunitas internasional, dan pengelolaan administrasi yang berkelanjutan.⁹ Dengan menyengketakan kawasan Laut Cina Selatan, Cina dapat dengan bebas melakukan kepentingan politiknya meliputi, perluasan pengaruh ekonomi, peningkatan kekuatan militer, eksplorasi sumber daya alam, pengembangan sektor wisata, dan lain sebagainya.

Klaim Cina atas Laut Cina Selatan juga bertumpang-tindih dengan klaim dari negara-negara lainnya yang juga memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Seperti Filipina yang mengklaim gugusan Kepulauan Spratly yang berada di sekitar

⁷ Republika Team. 2015. *Laut Cina Selatan, Sehampar Laut untuk Enam Negeri*. Diakses Melalui <https://republika.co.id/berita/nlv7xv/laut-cina-selatan-sehampar-laut-untuk-enam-negeri> , pada 18 September 2021

⁸ Council on Foreign Relations. Tanpa Tahun. *Cina's Maritime Disputes*. Diakses melalui https://www.cfr.org/chinas-maritime-disputes/#!/chinas-maritime-disputes?cid=otr-marketing_use-china_sea_InfoGuide , pada 27 Oktober 2021

⁹ Faudzan Farhana. 2014. MEMAHAMI PERSPEKTIF TIONGKOK DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN. *Jurnal Penelitian Politik*. Vol 11, Hal 169-170

kawasan Laut Cina Selatan sebagai kawasan teritorialnya. Kepulauan tersebut berjarak kurang lebih sekitar 160 kilometer dari Filipina.¹⁰ Sama halnya seperti Cina, Filipina juga menaruh perhatian di Kepulauan Spratly, dimana di kepulauan tersebut memiliki sumber daya gas alam dan minyak bumi yang sangat melimpah. Selain cadangan sumber daya alam, kawasan tersebut juga merupakan posisi yang sangat strategis dalam aspek ekonomi dan pariwisata.¹¹

Selain Filipina, negara lain seperti Malaysia dan Brunei Darussalam juga sangat tertarik dengan potensi dan letak Laut Cina Selatan yang sangat strategis. Klaim Malaysia atas Laut Cina Selatan terbatas pada semenanjung utara Pulau Kalimantan dan mengklaim beberapa gugusan Kepulauan Spratly. Berbeda dengan negara-negara lainnya, Brunei Darussalam sama sekali tidak mengklaim gugusan kepulauan yang terdapat di Laut Cina Selatan. Klaim Brunei Darussalam atas Laut Cina Selatan sesuai dengan keputusan UNCLOS 1982 (*United Nation Convention of Law of the Sea*) yang menetapkan batas teritorial laut suatu negara sejauh ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) seluas 200 mill.¹² Kedua negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda, dimana Malaysia ingin memanfaatkan Laut Cina Selatan sebagai jalur perdagangan bebas, menjaga hubungan antar negara, sekaligus memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di Laut Cina Selatan.¹³ Sedangkan,

¹⁰ *Republika Team, Loc Cit.*

¹¹ Olivia Lebrina Inuhan, Lucia Charlota Octovina Tahamata, dan Dyah Ridhul Airin Daties. 2021. Upaya Hukum Filipina untuk Mendapatkan Hak Berdaulat atas Kepulauan Kalayaan (Kepulauan Sparty). *TATOHI Jurnal Hukum*, Vol 1, Hal 197.

¹² Romi Jain. 2019. The South China Sea Issue: A Critical Appraisal of China's Geo-Economic Strategy. *Indian Journal of Asian Affairs*, Vol 32, Hal 35

¹³ Fajar Nugraha. 2017. *Tiga Kepentingan Malaysia di Laut China Selatan*. Diakses melalui <https://www.medcom.id/internasional/asia/3NO03jWb-tiga-kepentingan-malaysia-di-laut-china-selatan#:~:text=Malaysia%20menjadi%20salah%20satu%20negara,mengklaim%20wilayah%20La>

kepentingan nasional Brunei Darussalam berfokus pada eksplorasi sumber daya alam.¹⁴

Tidak sampai disitu, Vietnam juga mengklaim kawasan Laut Cina Selatan sebagai salah satu wilayah kedaulatannya. Vietnam merupakan salah satu negara dari ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) yang sering terlibat persengketaan Laut Cina Selatan terutama dengan Cina. Klaim Vietnam atas Laut Cina Selatan didasarkan pada jejak historis meliputi sejarah Dinasti Nguyen dan sejarah penjajahan Prancis di Vietnam. Kawasan Laut Cina Selatan yang di klaim Vietnam meliputi seluruh gugusan Kepulauan Paracel dan beberapa pulau yang terdapat di Kepulauan Spratly. Vietnam menaruh perhatian terhadap potensi kekayaan sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam.¹⁵

Tabel 1. 1 Wilayah dan Kepentingan Nasional Setiap Negara di Laut Cina Selatan

No	Negara	Wilayah Yang Di Klaim	Kepentingan Nasional
1.	China	Hampir Keseluruhan Luas Laut Cina Selatan	Ekonomi, Peningkatan Militer, Eksplorasi SDA, Pariwisata
2.	Filiphina	Kepulauan Spratly	Minyak Bumi dan Gas Alam, Sektor perikanan

ut%20China%20Selatan.&text=Sementara%20kepentingan%20kedua%20Malaysia%20dalam,kunci%20lainnya%20seperti%20Selat%20Malaka , pada 5 Desember 2021

¹⁴ Sarah Meiliana Gunawan. 2020. *Soal Konflik Laut China Selatan, Brunei Punya Cara Diplomasi Sendiri*. Diakses melalui <https://dunia.rmol.id/read/2020/08/24/449406/soal-konflik-laut-china-selatan-brunei-punya-cara-diplomasi-sendiri> , pada 5 Desember 2021

¹⁵ I Gede Made Dwi Jaya. 2015. Kepentingan Vietnam Dalam Konflik Laut China Selatan. *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL*, Hal 7

3.	Malaysia	Beberapa Kepulauan Spratly	Jalur Pelayaran dan SDA
4.	Brunei Darussalam	Sesuai dengan ketentuan ZEE Brunei Darussalam	Minyak Bumi dan Gas Alam
5.	Vietnam	Kepulauan Paracel dan beberapa pulau di kepulauan Spratly	Minyak Bumi dan Gas Alam

Sumber: Diartikulasikan oleh penulis

Melihat berbagai kepentingan di Laut Cina Selatan tentu membuat negara-negara yang bersengketa akan mempertahankan kedaulatannya di kawasan tersebut. Salah satu negara di ASEAN yang bersikukuh atas kedaulatannya di Laut Cina Selatan adalah Vietnam. Vietnam mengajukan klaim atas Laut Cina Selatan kepada CLCS (*United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf*) pada bulan Mei 2009. Selain mengajukan klaimnya kepada CLCS, Vietnam juga membuat beberapa kebijakan dengan membentuk UU maritim pada bulan Juni 2012 yang menjelaskan pengeklaiman Vietnam secara yurisdiksi memasukan Kepulauan Spratly sebagai wilayah administrasi provinsi Vietnam dan membuat Vietnam memiliki wewenang untuk melakukan register atau pendataan kepada kapal asing yang melewati kawasan tersebut.¹⁶ Pengeklaiman Vietnam ditolak keras oleh Pemerintahan Cina yang merasa memiliki pengaruh lebih di Laut Cina Selatan dibandingkan dengan Vietnam. Cina mengajukan penolakannya dengan

¹⁶ Sukma Ayu Putri. 2018. Peran ASEAN Security Community dalam Persengketaan Laut China Selatan (Studi dari tahun 1930 hingga 2016). *IJIR - Indonesian Journal of International Relations*, Vol 2, Hal 32.

mengirimkan surat penolakan kepada Dewan Sekretariat Jenderal PBB CLCS pada tanggal 7 Mei 2009.¹⁷ Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa Cina memprotes tindakan yang dilakukan oleh Vietnam dan menegaskan bahwa Cina telah mengklaim kawasan tersebut sejak 1947. Namun sejatinya, klaim Cina atas Laut Cina Selatan bertentangan dengan keputusan UNCLOS 1982 yang menetapkan wilayah laut teritorial suatu negara dengan ZEE seluas 200 mill sehingga Sekretariat Jenderal PBB CLCS melolak surat dari Cina tersebut.¹⁸

Cina dan Vietnam sudah menjadi rival dalam memperebutkan Laut Cina Selatan sejak 1970 an.¹⁹ Rasa saling benci dan tidak percaya saling timbul di dalam diri masing-masing sehingga menimbulkan gesekan politik kepentingan terus berlanjut tanpa adanya solusi bagi kedua belah pihak. Ditambah dengan sikap Cina yang semakin agresif dengan mengirimkan pasukan patroli angkatan laut dan membuat Cina semakin dipandang buruk oleh komunitas internasional.²⁰ Tanpa adanya dukungan dan pengakuan dari negara lain tentu akan mempersulit Cina dalam mempertahankan posisinya di Laut Cina Selatan. Hal ini membuat Cina mengubah beberapa kebijakan pemerintahannya khususnya dalam pendekatan ekonomi dan politik.

Cina yang awalnya menganut sistem ekonomi politik komunisme – marxisme, mulai membuka perekonomiannya dengan berlandaskan pada kebijakan

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ M. F. Mukhti. 2017. *Tiongkok Kalahkan Vietnam di Paracel*. Diakses melalui <https://historia.id/militer/articles/tiongkok-kalahkan-vietnam-di-paracel-6l7Gw> , Pada 22 November 2021

pintu terbuka atau *Kaifang Zhenze*²¹ dibawah kepemimpinan Deng Xiaoping pada tahun 1980-an.²² Kebijakan tersebut mengawali perubahan sistem ekonomi Cina yang komunis mulai berubah ke ranah sistem ekonomi liberal. Dengan perubahan sistem ekonomi tersebut Cina mulai melebarkan sayap untuk membuat hubungan kerjasama dan bergabung dengan organisasi internasional lainnya seperti WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 2001. Tidak hanya itu, pemerintah Cina juga mulai melakukan berbagai pendekatan ekonomi politik dengan negara anggota ASEAN termasuk dengan negara-negara yang terlibat ke dalam persengketaan tersebut yang terbentuk kedalam suatu bentuk mitra kerjasama internasional CAFTA (China-ASEAN Free Trade Area).²³ Hubungan diplomatik Cina dalam menjalin kerjasama terus berkembang dan menciptakan sebuah proyek inisiatif hubungan kerjasama multilateral yang menghubungkan perekonomian di 3 benua meliputi Asia, Afrika, dan Eropa dengan tajuk *One Belt One Road (OBOR) Initiative*.²⁴

Pembentukan Inisiatif OBOR ditandai dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden Cina, Xi Jinping di Indonesia dan Kazakhstan pada tahun 2013.²⁵ Dalam pidato tersebut Xi menjelaskan setidaknya terdapat 2 jalur utama yang akan menghubungkan negara-negara yang menjadi mitra dalam proyek tersebut yaitu

²¹ Ade Priangani dan Jeremy Aldi Risky Hattu, *Op. Cit, Hal 117*

²² Shang-Jin Wei.1995. The Open Door Policy and China's Rapid Growth: Evidence from City-Level Data . *National Bureau of Economic Research*, Vol 4, Hal 74.

²³ Ade Priangani dan Jeremy Aldi Risky Hattu, *Op. Cit, Hal 117*

²⁴ Yandri Kurniawan, Y. 2016. ONE BELT ONE ROAD (OBOR): AGENDA KEAMANAN LIBERAL TIONGKOK? *Politica*, Vol 7, Hal 234

²⁵ *Ibid*

Silk Road Economic Belt dan *The 21st Maritime Silk Road*.²⁶ *Silk Road Economic Belt* berfungsi sebagai jalur penghubung antara Cina bagian barat (khususnya provinsi tertinggal) dengan benua Eropa melalui jalur kereta api yang melintasi Asia Tengah dan Rusia. Sedangkan *The 21st Maritime Silk Road* merupakan jalur laut yang menghubungkan Cina dengan kawasan Asia dan Afrika melalui pelabuhan dan kapal-kapal pengangkut barang. Proyek raksasa tersebut menawarkan berbagai bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi antara lain penanaman investasi dan modal, pembangunan infrastruktur, perdagangan bebas, koordinasi kebijakan, dan pertukaran sumber daya manusia (*people to people exchange*).²⁷

Terdapat beberapa program yang dibentuk oleh Cina guna merealisasikan dan mendanai proyek OBOR agar dapat berjalan dengan baik antara lain *New Development Bank* yang dibentuk pada tahun 2013, *The Silk Road Fund* yang dibentuk pada tahun 2014, dan AIIB (*Asian Infrastructure Investment Bank*) yang dibentuk pada tahun 2015.²⁸ Setidaknya diperlukan sekitar \$100 miliar untuk mendanai proyek OBOR setiap tahunnya.²⁹ Diantara beberapa program tersebut AIIB menjadi salah satu proyek OBOR yang berperan penting dalam pinjaman pendanaan untuk pembangunan dan investasi. Tercatat setidaknya terdapat 104

²⁶ Syaiful Anam & Ristiyani. 2018. Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping. *JIIH-PACIS*, Vol 14, Hal 2.

²⁷ Van-Hoa Vu, Jenn-Jaw Soong, dan Khac-Nghia Nguyen. 2020. Vietnam's Perceptions and Strategies toward China's Belt and Road Initiative Expansion: Hedging with Resisting. *The Chinese Economy*, Vol 54, Hal 1.

²⁸ Jenn-Jaw Soong dan Khac Nghia Nguyen. 2019. China's OBOR Initiative and Vietnam's Political. *The Chinese Economy*, Vol 51, Hal 344.

²⁹ *Ibid*

negara yang terdaftar sebagai anggota aktif AIIB seperti beberapa negara di Asia Tenggara meliputi Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Vietnam.³⁰

Vietnam dan Cina menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) OBOR pada November 2017.³¹ Vietnam memiliki keraguan dan bersikap sangat berhati-hati dalam menanggapi inisiatif OBOR tersebut. Vietnam khawatir jika proyek raksasa tersebut dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi maupun politik Vietnam, namun disisi lain Vietnam melihat OBOR memiliki dampak yang sangat menjanjikan dalam membangun perekonomian. Sehingga menimbulkan persepsi keinginan dan kecurigaan yang kompleks terhadap proyek tersebut. Kerjasama bilateral umumnya berlandaskan pada hubungan persahabatan dan kerjasama antar kedua belah pihak. Namun Pemerintah Vietnam melihat Cina sebagai mitra kerjasama sehingga jika kedua belah pihak menandatangani perjanjian kerjasama maka hubungan tersebut bersifat kontrak.³² Disisi lain Vietnam bersikap hati-hati terhadap program OBOR lainnya seperti AIIB. Bagi Vietnam AIIB hanyalah umpan yang disiapkan oleh pemerintah Cina untuk mempengaruhi kebijakan perekonomian dan keamanan mereka. Namun untuk memenuhi program pembangunan ekonomi dan infrastruktur, Vietnam menandatangani dengan Cina untuk bergabung dalam keanggotaan AIIB pada April 2016.³³

³⁰ AAIB. Tanpa Tanggal. *Members and Prospective Members of the Bank*. Diakses Pada November 6, 2021, Dikutip Dari AIIB.org: <https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html>

³¹ The ASEAN Post. 2018. *Challenges for the Belt and Road Initiative in Vietnam* Diakses melalui <https://theaseanpost.com/article/challenges-belt-and-road-initiative-vietnam> , pada 27 November 2021

³² Van-Hoa Vu, Jenn-Jaw Soong, dan Khac-Nghia Nguyen, *Op. Cit*, Hal 4

³³ Jenn-Jaw Soong dan Khac Nghia Nguyen, *Loc. Cit*.

Inisiatif OBOR tidak terlepas dari ambisi Cina dalam menanamkan hegemoni dan menyebarluaskan pengaruhnya di kawasan Asia. Kebijakan OBOR memungkinkan Cina untuk memegang kendali terhadap regulasi dan kebijakan yang dibentuk oleh suatu negara seperti permasalahan atas sengketa Laut Cina Selatan. Hal ini tentu akan berdampak pada negara-negara ASEAN yang juga memperebutkan kedaulatannya atas sengketa Laut Cina Selatan. Namun, dengan adanya kebijakan OBOR juga meminimalisir konflik berkepanjangan antara Cina dan negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam. Hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan (*win-win relation*). Penulis juga mengkaji beberapa tinjauan pustaka terkait permasalahan Laut Cina Selatan. Dalam jurnalnya yang berjudul *One Belt One Road: Agenda Keamanan Liberal Tiongkok*, Yaunary Kurniawan (2016) menyatakan OBOR merupakan agenda keamanan pemerintah Cina yang ditawarkan kepada negara-negara lainnya melalui kerjasama multilateral.³⁴ Hal ini menekankan dengan adanya kerjasama ekonomi di kawasan akan membuat negara saling percaya satu sama lain. Melanjutkan tinjauan pustaka sebelumnya, Anam dan Ristiyani (2018) menjelaskan dalam jurnalnya yang berjudul *Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping* menjelaskan dengan adanya kebijakan OBOR akan membantu Cina dalam membangun Hegemoninya di berbagai bidang.³⁵ Hal ini didukung dengan program-program pembangunan ekonomi OBOR yang saling

³⁴ Yandri Kurniawan. 2016. ONE BELT ONE ROAD (OBOR): AGENDA KEAMANAN LIBERAL TIONGKOK? *Politica*, Vol 7, Hal 233-254

³⁵ Syaiful Anam & Ristiyani. 2018. Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping. *JIIHI-PACIS*, Vol 14, Hal 1-20.

terhubung satu sama lain dan Cina menjadi pemegang peran utama dalam kebijakan tersebut. Disisi lain, negara-negara yang tergabung ke dalam kebijakan OBOR sangat berhati-hati rencana Cina dalam kebijakan OBOR tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Van-Hoa Vu. et al. (2020) dalam jurnalnya yang berjudul *Vietnam's Perceptions and Strategies toward China's Belt and Road Initiative Expansion: Hedging with Resisting* menjelaskan bagaimana Persepsi Vietnam dalam menjalin hubungan bekerjasama dengan Cina melalui kebijakan OBOR demi meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya mengingat kedua belah pihak masih memperlakukan sengketa Laut Cina Selatan yang sampai sekarang masih belum selesai.³⁶

Terdapat beberapa penelitian yang sama dengan penelitian ini, dimana penelitian tersebut membahas mengenai “Bagaimana Cina mendapatkan kedaulatannya atas Laut Cina Selatan dengan Vietnam melalui kebijakan inisiatif OBOR”. Namun terdapat perbedaan fokus dalam penelitian ini, dimana dalam penelitian ini akan menjelaskan “Bagaimana peran kebijakan OBOR inisiatif dapat meredakan ketegangan sengketa Laut Cina Selatan antara Cina dengan Vietnam”. Dengan jangka waktu penelitian dari tahun 2017 – 2021.

³⁶ Van-Hoa Vu, Jenn-Jaw Soong, dan Khac-Nghia Nguyen. 2020. Vietnam's Perceptions and Strategies toward China's Belt and Road Initiative Expansion: Hedging with Resisting. *The Chinese Economy*, Vol 54, Hal 1-13

1.2 Rumusan Masalah

Dalam latar belakang sebelumnya telah dijelaskan apa itu kebijakan inisiatif OBOR dan mengapa Cina dan Vietnam saling memperebutkan kedaulatan atas kawasan Laut Cina Selatan hingga menimbulkan konflik berkepanjangan. Inisiatif OBOR telah berperan penting dalam menciptakan hubungan kerjasama antara kedua belah pihak, sehingga penelitian ini akan menggunakan rumusan masalah *“Bagaimana Peran OBOR Initiative Dalam Meredam Ketegangan Sengketa Laut Cina Selatan Antara Cina dan Vietnam Pada Tahun 2017-2021”*

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan sebagai pemenuhan syarat dalam memperoleh gelar sarjana program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran kebijakan inisiatif OBOR dapat meredam konflik yang berkepanjangan antara Cina dan Vietnam terkait sengketa Laut Cina Selatan. Kebijakan inisiatif OBOR merupakan bentuk kerjasama yang dibentuk oleh Cina yang bertujuan untuk menghubungkan perekonomian 3 benua dengan mempromosikan berbagai program ekonomi lainnya. Selain itu, dengan adanya kebijakan tersebut Cina akan semakin mudah

dalam menanamkan pengaruh hegemoninya di berbagai negara. Disisi lain, Vietnam melihat OBOR sebagai kebijakan yang menguntungkan sekaligus mengancam sistem perekonomian dan keamanan Vietnam. Hal ini membuat Vietnam berhati-hati dalam menyikapi OBOR.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori

1.4.1.1 Neoliberalisme

Neoliberalisme merupakan salah satu perspektif teoritik atau pendekatan dalam studi hubungan internasional yang memfokuskan pada konsep *contacting* dan rasionalitas. Dalam pendekatannya teori ini mengkritik teori sebelumnya yaitu neorealisme. Griffith dan O’Callaghan (2002) dalam bukunya yang berjudul “*International Relations: The Key Concepts*” menjelaskan bahwa neorealisme memandang sistem internasional bersifat anarki yang dimana tidak ada negara atau entitas tertentu yang dapat mengatur sistem internasional secara keseluruhan.³⁷ Negara-negara yang memeluk paham neorealis cenderung bersifat konfliktual, sehingga memaksa negara-negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dengan memaksimalkan kapabilitas keamanan dan kekuatan yang dimiliki oleh setiap negara.³⁸

³⁷ Martin Griffiths dan Terry O’Callaghan. 2002. *International relations: The Key Concept*. New York: Routledge. Hal 278-280

³⁸ Vinsensio Dugis. 2016. *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS). Hal 111.

Neoliberalisme memiliki pandangan yang hampir sama dan kesepakatan terhadap sistem internasional yang anarki. Namun neoliberalisme tidak sepakat dengan pandangan neorealisme dimana negara-negara bersifat konfliktual. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendekatan neorealis yang gagal memprediksikan akhir dari perang dingin yang pada kenyataannya berakhir dengan damai. Selain itu, neoliberalis juga menekankan peran organisasi atau institusi internasional dalam dinamika hubungan internasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa neoliberalisme menitikberatkan pada hubungan kerjasama yang terbentuk di dalam politik internasional yang anarki.³⁹

Dalam bukunya, Dugis (2016) mengutip tulisan dari Steven Lamy (2001) yang menjelaskan empat asumsi dasar kerangka pemikiran neoliberalisme dalam menjelaskan kerjasama dalam sistem politik anarki yang dapat memberikan perdamaian dan stabilitas internasional.⁴⁰ Antara lain (1) pertama, neorealisme melihat negara bukan satu-satunya aktor yang berpengaruh. Institusi dan organisasi internasional juga turut berperan dalam lingkungan politik internasional yang anarki. (2) Kedua, setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing, sehingga neorealisme melihat dengan adanya kerjasama mempermudah setiap negara untuk mendapatkan keuntungan absolut. (3) Ketiga, dengan hadirnya institusi dan organisasi internasional akan membantu negara-negara untuk menjaga hubungan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir terjadinya

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*, Hal 112-113.

kecurangan. (4) Keempat, institusi dan organisasi internasional dapat berperan sebagai wadah, dimana sumber daya dari berbagai negara yang tergabung didalamnya dapat terorganisir dengan baik, sekaligus memberikan keamanan kepentingan nasional negara-negara tersebut terhadap sumber daya yang digunakan.

1.4.1.2 Issue Linkage

Issue linkage merupakan teori yang dibentuk oleh Ernest B. Hass. Teori ini dideskripsikan sebagai strategi tawar menawar yang melibatkan atau menghubungkan dua isu yang berbeda ke dalam sebuah kesepakatan atau kerjasama antara kedua belah pihak.⁴¹ Dalam tulisannya, Hass membagi pendekatan issue linkage menjadi tiga bagian antara lain *tactical issue linkage*, *fragmented issue linkage*, dan *substantive issue linkage*.

Tactical issue linkage mendefinisikan suatu proses negosiasi yang menghubungkan suatu isu dengan isu lain ke dalam suatu perjanjian. Kedua *Fragmented issue linkage*, pendekatan ini berusaha untuk menghubungkan isu ke dalam suatu koalisi yang bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan sosial. Terakhir *Substantive issue linkage*, pendekatan ini bertujuan untuk menghubungkan suatu isu yang didukung adanya pembuktian intelektual yang memungkinkan adanya keuntungan yang lebih banyak.

⁴¹ Ernest B. Hass. 1980. Why Collaborate? Issue-Linkage and International Regimes. *Cambridge*, Hal 357 - 405

Pendekatan issue linkage dapat berhasil ketika negara membawa permasalahan tersebut ke dalam forum internasional yang berakhir pada kerjasama internasional dan dapat direalisasikan. Selain itu, jika terdapat negara yang memiliki *power* yang dapat mendominasi sumberdaya tersebut maka negara tersebut dapat membuat keputusan dalam suatu kebijakan atau menarik negara lain untuk melakukan kerjasama. Hal ini sejalan dengan pemikiran Hass dimana dalam teori ini terdapat dua aktor yaitu *Linker* dan *Linkee*. *Linker* memiliki kekuatan atau *power* yang lebih dominan sehingga dapat mempengaruhi *Linkee* dalam pengambilan persepsi.⁴²

1.4.1.3 Teori Interdependensi

Teori interdependensi merupakan salah satu teori hubungan internasional yang digunakan untuk menggambarkan situasi dan sifat sistem internasional pada saat ini. Robert Jackson dan Georg Sorensen, dalam bukunya yang berjudul “studi pengantar hubungan internasional” menjelaskan bahwa teori interdependensi secara sederhana dapat dipahami sebagai hubungan antar negara yang bersifat timbal balik dan saling bergantung sama lain untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai keinginan bersama.⁴³ Teori ini juga merupakan bentuk turunan dari pendekatan teori liberalisme. Teori liberalisme menyatakan bahwa dengan adanya transisi sistem pemerintahan ke bentuk yang lebih modern, maka akan memperkuat

⁴² *Ibid*

⁴³ Robert Jackson, Georg Sorensen. 2014. *Pengantar studi hubungan Internasional : teori dan pendekatan*. Jakarta; Pustaka Pelajar. Hal. 109

ikatan saling ketergantungan (interdependensi) antara negara-negara yang terlibat ke dalam suatu hubungan kerjasama.⁴⁴

Kerjasama ekonomi menjadi salah satu pendekatan yang paling sering ditemui dalam menganalisis pendekatan interdependensi. Dalam hal ini, kerjasama ekonomi seperti kegiatan perdagangan ekspor dan impor menjadi salah satu indikator dalam mengukur interdependensi suatu negara dengan negara lain. Kegiatan ekspor dan impor memberikan keuntungan dalam perekonomian suatu negara. Keuntungan tersebut dapat dirasakan oleh berbagai kalangan khususnya kepada aktor pelaku kegiatan ekspor impor dan pemangku pembentukan kerjasama atau negara-negara yang telah membentuk hubungan kerjasama tersebut.⁴⁵

Selain kegiatan ekspor dan impor, investasi asing juga memainkan peran penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Penanaman investasi asing oleh suatu negara dapat memberikan dorongan dalam meningkatkan pembangunan perekonomian negara lain dan memberikan akses lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Dari kedua pendekatan ekonomi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa negara-negara yang melakukan hubungan kerjasama ekonomi akan menimbulkan efek interdependensi yang dimana kedua

⁴⁴ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yadi. 2005. *Pengantar ilmu hubungan internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 78

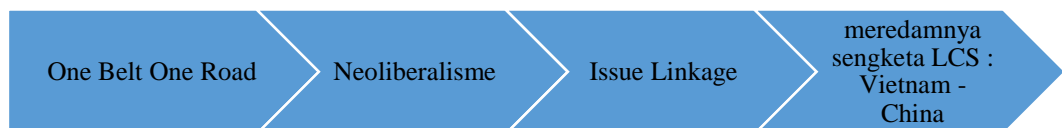
⁴⁵ Febry Triantama. 2020. INTERDEPENDENSI EKONOMI SEBAGAI PENCIPTA PERDAMAIAN ASIA TIMUR. *Jurnal Dinamika Global*, Vol. 5 Hal. 282

negara saling bergantung satu sama lain dalam melanjutkan kerjasama-kerjasama ekonomi yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.⁴⁶

Disisi lain, para aktor penganut teori interdependensi juga memiliki kepercayaan bahwa interdependensi ekonomi yang saling menguntungkan akan menciptakan perdamaian bagi negara-negara yang ikut terlibat di dalamnya. Ketika suatu negara mendapatkan keuntungan atau manfaat dari hubungan yang saling bergantung satu sama lain, maka negara tersebut akan sebisa mungkin untuk menghindari konflik atau perang. Perang dianggap dapat merusak hubungan yang telah dijalin dan menghilangkan potensi keuntungan yang didapat melalui pembentukan hubungan kerjasama tersebut.⁴⁷

1.5 Sintesa Pemikiran

Bagan 1. 1 Sintesa Pemikiran



Diawali dengan kebijakan OBOR Cina yang menawarkan berbagai keuntungan dari segi ekonomi dan pembangunan. Kemudian dilanjutkan dengan pendekatan neoliberalisme yang akan digunakan oleh penulis sebagai landasan kerjasama ekonomi dapat menciptakan perdamaian. Setelah itu penulis akan

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Febry Triantama. *Op. Cit.* Hal. 281

menghubungkan kerjasama OBOR dengan isu sengketa Laut Cina Selatan melalui pendekatan issue linkage dan meredam konflik antara Cina dan Vietnam.

1.6 Argumen Utama

Hubungan antara Vietnam dan Cina tidak terlalu berjalan dengan baik mengingat permasalahan sengketa Laut Cina Selatan. Kedua belah pihak saling memperebutkan kawasan tersebut satu sama lain, sehingga memungkinkan terjadinya konflik sangat besar. Disisi lain Cina dengan kekuatan ekonominya mulai mendekati diri kepada Vietnam melalui kebijakan barunya OBOR.

Penulis melihat OBOR sebagai kebijakan yang efektif dalam menjalin hubungan kerjasama ekonomi yang baik. Disisi lain kebijakan ini juga berperan penting dalam menyebarkan pengaruh Cina di negara-negara mitranya. Hal ini menjadikan keuntungan absolut bagi Cina sekaligus memberikan Cina pengaruh yang besar dalam memperebutkan sengketa Laut Cina Selatan dengan Vietnam

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukannya sebuah metode penelitian guna dapat merealisasikan tujuan dari dilakukannya sebuah penelitian. Terdapat berbagai jenis metode penelitian yang sering kali digunakan dalam mengkaji suatu permasalahan. Namun dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode

deskriptif. Metode deskriptif memberikan suatu gambaran, penjelasan, deskripsi, dan kebenaran terhadap suatu fenomena yang sedang diteliti. Sehingga pengujian suatu hipotesis tidak terlalu dibutuhkan dalam metode penelitian tersebut.⁴⁸

Metode penelitian deskriptif dinilai tepat untuk mengkaji penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode deskriptif dinilai dapat memudahkan penelitian dalam mengkaji berbagai fenomena internasional terkait topik pembahasan yang dibawakan oleh penulis sehingga dapat menjelaskan “Bagaimana Peran Kebijakan One Belt One Road (OBOR) Initiative Dalam Meredam Ketegangan Sengketa Laut Cina Selatan Antara Cina dan Vietnam Pada Tahun 2017-2021”.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian merupakan batasan awal dan akhir yang dilakukan oleh penulis guna membatasi jangka waktu penulisan yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada jangka waktu penelitian pada tahun 2017 hingga 2021. Penggunaan jangka waktu tersebut dikarenakan pada tahun 2017 merupakan awal bergabungnya Vietnam ke dalam kebijakan inisiatif OBOR. Kemudian penulis membatasi penelitian hingga tahun 2021 yang akan menjelaskan perkembangan terbaru terkait hubungan antara Cina dan Vietnam melalui program-program inisiatif OBOR khususnya dalam menghadapi menghadapi isu-isu terbaru

⁴⁸Cut Medika Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto. 2018. Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Jurnal Diakom*, Vol 1, Hal 84.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua teknik yang dapat digunakan sebagai proses pengumpulan data yaitu primer dan sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung melalui dari sumbernya melalui berbagai proses, seperti wawancara, observasi, dan penelitian langsung. Teknik pengumplan data primer menyajikan data terbaru dalam suatu studi kasus. Sedangkan data sekunder merupakan teknik penelitian yang didapat melalui sumber data yang telah ada, seperti buku, jurnal, artikel website, laporan dan lain sebagainya.

Namun dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang didapatkan melalui laman resmi *One Belt One Road Initiative* serta media informasi dan berita lainnya yang membahas keterkaitan hubungan antara Cina dan Vietnam terhadap sengketa Laut Cina Selatan melalui kebijakan inisiatif OBOR.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Terdapat dua bentuk teknis analisis data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Cresswell (2009) menjelaskan metode kualitatif merupakan teknik analisis yang berfokus pada data yang berbentuk deskriptif dan non-numerik. Sedangkan metode kuantitaif merupakan metode analisis data yang dilakukan secara numerik dengan menggunakan berbagai bentuk teknik statistik dalam kajiannya.⁴⁹

⁴⁹ John W. Cresswell. 2009. Qualitative Quantitative and Mixed Method Approaches. *Research Design*

Teknik analisis data kualitatif sering kali digunakan dalam kajian maupun penelitian hubungan internasional. Hal ini berkaitan dengan fenomena-fenomena hubungan internasional yang terdiri dari rangkuman-rangkuman peristiwa yang kompleks. Sehingga diperlukan adanya metode yang dapat menguraikan sehingga kajian yang akan dibahas dalam suatu penelitian dapat terbukti secara benar.⁵⁰ Dengan demikian penulis akan menggunakan teknik analisis data kualitatif sebagai pendekatan untuk meneliti “Peran Kebijakan One Belt One Road (OBOR) Initiative Dalam Meredam Ketegangan Sengketa Laut Cina Selatan Antara Cina dan Vietnam Pada Tahun 2017-2021”.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan tujuan dari penelitian, maka penulis akan menguraikan penelitian ini secara sistematis hal apa saja yang akan dibahas oleh penulis.

Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Landasan Teori dan Konseptual, Sintesa Pemikiran, Argumen Utama, Metodologi, dan Sistematika penulisan.

Bab II : Di Dalam Bab II, penulis akan menjelaskan sejarah persengketaan Laut Cina Selatan antara Cina dan Vietnam, program-program dari kebijakan

⁵⁰ *Ibid*

OBOR yang beroperasi di Vietnam, dan bagaimana respon Vietnam terhadap program-program OBOR tersebut.

Bab III : Di Dalam Bab III, penulis akan membahas perkembangan hubungan kerjasama antara Vietnam dan China melalui kebijakan OBOR. Dimana Cina berperan sebagai *Linker* dan Vietnam berperan sebagai *Linkee* dan menghubungkannya pada isu sengketa Laut Cina Selatan. Pada bagian ini penulis akan menghubungkan beberapa sektor, seperti pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Vietnam yang terkait kedalam proyek raksasa Cina tersebut. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan bagaimana kebijakan OBOR berperan dikala wabah pandemi COVID-19 di Vietnam.

Bab IV : Kesimpulan dan Saran